

ANALISA KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA LUBUKLINGGAU DITINJAU DARI RASIO KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS, EFISIENSI, AKTIVITAS, DAN PERTUMBUHAN PERIODE 2016-2020

Marta Pebriansyah¹, Dewi Anggraini², Yuli Nurhayati³

¹Program Studi Manajemen, Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia

^{2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia

Email: ¹marta.pebriansyah@gmail.com, ²yuli_nurhayati@univbinainsan.ac.id,

³dewi_anggraini@univbinainsan.ac.id

Abstrak

Masalah pada penelitian ini yakni bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau Kota Lubuklinggau ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisa yang digunakan adalah Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas, dan Pertumbuhan. Berdasarkan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali karena rata-rata rasio hanya mencapai 12% dengan pola hubungan instruktif, Rasio Efektivitas masih tergolong Kurang Efektif dengan rata-rata rasio mencapai 82%, Rasio Efisiensi tergolong Tidak Efisien dengan rata-rata rasio mencapai 951%, Rasio Aktivitas keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau dikategorikan Tidak Serasi dengan alokasi sebagian dana untuk belanja operasi rata-rata rasio 72% dan belanja modal rata-rata rasio 27%, dan Rasio Pertumbuhan pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan dengan rata-rata rasio 6%, Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata rasio 4% dan Belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata rasio mencapai 6%.

Kata kunci ; Kinerja Keuangan, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas, dan Pertumbuhan.

Abstract

The problem in this research is how is the financial performance of the Regional Financial and Asset Management Agency of Lubuklinggau City, Lubuklinggau City in terms of the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, and growth ratio? This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The analysis technique used is the Ratio of Independence, Effectiveness, Efficiency, Activity, and Growth. Based on the results of the study, it shows that the financial performance of the Lubuklinggau City Government in terms of the Regional Financial Independence Ratio is very low because the average ratio only reaches 12% with an instructive relationship pattern, the Effectiveness Ratio is still classified as Less Effective with an average ratio of 82%, the Efficiency Ratio classified as Inefficient with an average ratio of 951%, the Lubuklinggau City Government's Financial Activity Ratio is categorized as Incompatible with the allocation of some funds for operating expenditures an average ratio of 72% and an average capital expenditure ratio of 27%, and the Growth Ratio of Regional Original Revenues (PAD) grew by an average ratio of 6%, regional revenues grew by an average ratio of 4% and regional expenditures grew by an average ratio of 6%.

Keywords ; *Financial Performance, Independence, Effectiveness, Efficiency, Activity, and Growth.*

I. PENDAHULUAN

Menurut (Sujarweni, 2015, hlm. 107–110) dikutip dari Mardiasmo (2002) kinerja yakni pencapaian kerja yang telah dicapai dari suatu pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. informasi finansial untuk dalam penilaian kinerja finansial dengan melakukan analisis varians baik kinerja aktual/realisasi maupun yang telah dianggarkan, analisa varians berupa varians pendapatan, pengeluaran, belanja rutin, dan belanja modal. Setelah analisa varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut varians (Sujarweni, 2015).

Berdasarkan (Peraturan Walikota Lubuklinggau, 2019) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 21 Tahun 2019. Dalam menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sebagai pembantu pemerintah kota lubuklinggau yang telah dijelaskan diatas mengenai tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa pendapatan dan analisa belanja daerah yang telah ditetapkan. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah analisa rasio yang digunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas (keserasian belanja), dan Rasio Pertumbuhan. terdapat beberapa isu permasalahan antara lain : 1. Pendapatan daerah didominasi oleh pendapat transfer yang terdiri dari dana provinsi, pusat

dan pinjaman dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan adanya ketidakmandirian dari daerah. 2. Pendapatan asli daerah belum cukup dalam memenuhi target yang ditentukan sehingga tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah masih belum terpenuhi. 3. Pendapatan asli daerah masih sangat minim atau lebih kecil jika dibandingkan besaran Belanja daerah yang dimana biaya realisasi tersebut sangat besar. 4. Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, modal, dan tak terduga. Besaran belanja daerah dialokasikan pada belanja operasi dibandingkan belanja modal dan tak terduga. 5. Pendapatan daerah, pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sedangkan belanja daerah adanya peningkatan setiap tahunnya terkecuali tahun 2020 mengalami penurunan, bagaimana tingkat pertumbuhannya, apakah positif atau negatif?

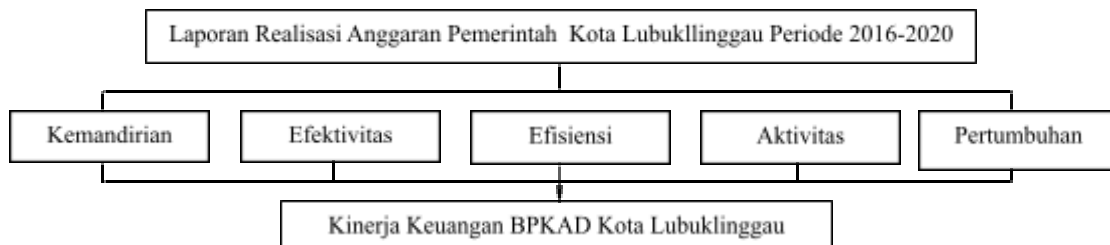
Penelitian terdahulu mengenai analisa kinerja keuangan dengan rasio keuangan terkait. Penelitian (Hartoyo & Arsad, 2021) menunjukkan hasil Penelitian bahwa kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang rata-rata rasio 6,57%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungan instruktif rasio sebesar 7,17%. Rasio efektivitas sudah efektif rata-rata 108,71%. Rasio Efisiensi dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi 99,61%. Rasio Keserasian diketahui rata-rata belanja operasi daerah sangat tinggi 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99%.

(Qur'ani & Panggiarti, 2021) bahwa Hasil penelitian rasio kemandirian 38,73% tergolong rendah, rasio efektivitas 110,85% tergolong efektif, rasio efisiensi 100,22% tergolong tidak efisien, rasio keserasian/ aktivitas belanja tergolong tidak efisien. Rasio belanja operasional 87,16% dan rasio

belanja modal 24,66%, dan rasio pertumbuhan 10,16% tergolong rendah. (Fornia dkk., 2021) hasil Penelitian bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, rasio derajat desentralisasi kategori kurang, rasio efektifitas sangat efektif, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja mengalami kenaikan dan penurunan, dan rasio efisiensi belanja efisien.

Masalah yang akan dikaji pada penelitian terkait adalah bagaimana Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau ditinjau dari Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas, dan Pertumbuhan periode 2016-2020. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau ditinjau dari Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas, dan Pertumbuhan periode 2016-2020.

2.2 Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan, 2022

Gambar 1. Kerangka Berpikir

2.3 Teknik Analisis Data

a. Rasio Kemandirian

Menurut (Mahmudi, 2019) Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan realisasi total pendapatan yang terdiri transfer dana pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman. rasio kemandirian daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat+provinsi+pinjaman}} \times$$

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisa Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari Rasio Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, Aktivitas, Dan Pertumbuhan Periode 2016-2020”**.

II. METODOLOGI PENELITIAN

I.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau yang berlokasi di jalan Garuda No. 10 Kayu Ara, Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Barat I. Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan penelitian yakni Laporan Realisasi Anggaran selama periode 2016-2020.

Tabel 1. Kriteria Kemandirian Pemerintah Daerah

Kemampuan Keuangan.	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Berdasarkan pendapat (Halim, 2007 dalam Qur'ani & Panggiarti, 2021) pola hubungan memiliki beberapa hubungan yakni : 1. Pola hubungan Instruktif merupakan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. 2. Pola hubungan konsultatif merupakan kontribusi pemerintah pusat sudah mulai berkurang. 3. Pola hubungan partisipatif merupakan peranan pemerintah pusat semakin berkurang hal tersebut tingkat kemandirian daerah yang bersangkutan telah mendekati mampu. 4. Pola hubungan delegatif merupakan suatu daerah telah mampu dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah.

b. Rasio Efektivitas

Menurut (Mahmudi, 2019) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) merupakan rasio yang mengukur dan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Kriteria Efektivitas (%)	Persentase Efektivitas
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber : (Mahmudi, 2019)

c. Rasio Efisiensi

Menurut (Mahmudi, 2019) rasio ini merupakan rasio yang dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi (%)	Persentase Efisiensi
<10	Sangat Efisiensi,
10-20	Effisien,
21-30	Cukup Efisien,
31-40	Kurang Efisien,
>40	Tidak Efisien.

Sumber : (Mahmudi, 2019)

d. Rasio Aktivitas

Dikutip dari (Halim, 2007 dalam Qur'ani & Panggiarti, 2021)) Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio ini terdiri dari 2 rasio yakni :

1. Rasio belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Tabel 4. Kriteria Penilaian Rasio aktivitas

No.	Kriterian Penilaian	Porsi	Keterangan
1	Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	60-90 %	Apabila sama proporsi yang terkait maka dikategorikan serasi, namun apabila lebih atau kurang dari
2	Belanja Modal Terhadap Total Belanja	5-20 %	proporsi yang terkait maka tidak serasi.

Sumber : (Mahmudi, 2019)

e. Rasio Pertumbuhan

Menurut (Mahmudi, 2019) Rasio pertumbuhan merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu ataupun periode tertentu.

1	Pertumbuhan PAD	$\frac{\text{PAD } t - \text{PAD } t-1}{\text{PAD } t-1} \times 100\%$
2	Pertumbuhan Pendapatan	$\frac{\text{Pendapatan } t - \text{Pendapatan } t-1}{\text{Pendapatan } t-1} \times 100\%$
3	Pertumbuhan Belanja daerah	$\frac{\text{Belanja Daerah } t - \text{Belanja Daerah } t-1}{\text{Belanja Daerah } t-1} \times 100\%$

Sumber : (Mahmudi, 2019)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rasio Kemandirian

Perhitungan rasio kemandirian pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel 5. sebagai berikut :

Tabel 5. Perhitungan Rasio Kemandirian (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian $C = a/b \times 100\%$	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
	a	b			
2016	75.797.426.519,36	807.832.268.410,62	9%	Rendah Sekali	Instruktif
2017	115.521.939.795,78	788.674.051.204,20	15%	Rendah Sekali	Instruktif
2018	105.606.815.786,70	790.476.187.559,56	13%	Rendah Sekali	Instruktif
2019	100.950.256.993,95	900.083.616.227,99	11%	Rendah Sekali	Instruktif
2020	86.319.561.348,87	908.254.490.662,72	10%	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-rata			12%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian pada tabel diatas rasio kemandirian pada tahun 2016 mencapai 9%, pada tahun 2017 rasio kemandirian naik menjadi 15%, pada tahun 2018 rasio kemandirian turun menjadi 13%, rasio kemandirian pada tahun 2019 turun menjadi 11%, dan rasio kemandirian pada tahun 2020 turun menjadi 10%. rata-rata rasio

kemandirian mencapai 12% dikategorikan rendah sekali dan berpola instruktif.

3.2 Rasio Efektivitas

Perhitungan rasio efektivitas Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efektivitas (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas $c = a/b \times 100\%$	Kriteria
	a	b		
2016	75.797.426.519,36	115.046.209.966,89	66%	Tidak Efektif
2017	115.521.939.795,78	146.720.756.033,00	79%	Kurang Efektif
2018	105.606.815.786,70	126.713.124.144,35	83%	Kurang Efektif
2019	100.950.256.993,95	110.089.253.223,08	92%	Cukup Efektif
2020	86.319.561.348,87	97.870.799.828,72	88%	Kurang Efektif
Rata-rata			82%	Kurang Efektif

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pada tabel diatas menunjukkan Pada tahun 2016 rasio efektivitas sebesar 66%, pada tahun 2017 ada peningkatan rasio efektivitas menjadi 79%, pada tahun 2018 rasio efektivitas naik menjadi 83%, sedangkan pada tahun 2019 rasio efektivitas naik menjadi 92%, dan pada tahun 2020

mengalami penurunan rasio dengan persentase rasio sebesar 88%. Rata-rata rasio efektivitas sebesar 82% dengan kategori kurang efektif.

3.3 Rasio Efisiensi

Perhitungan metode rasio efisiensi pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset

Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau dijelaskan dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efisiensi (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja Daerah a	Realisasi PAD b	Rasio Efisiensi $c = a/b \times 100\%$	Kriteria
2016	809.943.066.643,08	75.797.426.519,36	1069%	Tidak Efisien
2017	870.709.076.209,71	115.521.939.795,78	754%	Tidak Efisien
2018	859.504.888.223,19	105.606.815.786,70	814%	Tidak Efisien
2019	943.561.222.062,40	100.950.256.993,95	935%	Tidak Efisien
2020	1.020.120.939.565,77	86.319.561.348,87	1182%	Tidak Efisien
Rata-rata			951%	Tidak Efisien

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan pada tabel 7. perhitungan rasio efisiensi Pada tahun 2016 persentase rasio efisiensi adalah 1069%, pada tahun 2017 rasio efisiensi turun menjadi 754%, Pada tahun 2018 persentase rasio efisiensi naik menjadi 814% pada tahun 2019 persentase rasio efisiensi naik menjadi 935%, dan pada tahun 2020 persentase rasio efisiensi naik menjadi 1182%. rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2016 sampai dengan

tahun 2020 sebesar 951% dikagorikan tidak efisien.

3.4 Rasio Aktivitas

Perhitungan rasio aktivitas pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel 8. sebagai berikut :

Tabel 8. Perhitungan Rasio Aktivitas (dalam rupiah)

Tahun	Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah B.operas/total belanja x 100%	Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah B. modal/total belanja x 100%	Rasio Operasi	Rasio Modal	Ket.
2016	604.104.194.685,08 809.943.066.643,08	205.417.239.958,00 809.943.066.643,08	75%	25%	Tidak Serasi
2017	633.232.759.070,25 870.709.076.209,71	237.003.593.139,46 870.709.076.209,71	73%	27%	Tidak Serasi
2018	649.516.620.490,95 859.504.888.223,19	209.920.267.732,24 859.504.888.223,19	76%	24%	Tidak Serasi
2019	689.059.769.341,40 943.561.222.062,40	254.283.952.721,00 943.561.222.062,40	73%	27%	Tidak Serasi
2020	649.922.041.665,50 1.020.120.939.565,77	334.867.453.980,27 1.020.120.939.565,77	64%	33%	Tidak Serasi
Rata-Rata			72%	27%	Tidak Serasi

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 8. Perhitungan Rasio Aktivitas Pada tahun 2016 rasio belanja operasi sebesar 75% Sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 25%, rasio belanja operasi pada tahun 2017 turun menjadi 73%, sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2017 naik dengan persentase 27%, rasio belanja operasi pada tahun 2018 naik menjadi 76% sedangkan rasio belanja modal

pada tahun 2018 turun sebesar 24%, rasio belanja operasi pada tahun 2019 turun menjadi 73% sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2019 naik menjadi 27%, dan rasio belanja operasi pada tahun 2020 turun menjadi 64% sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2020 naik menjadi 33%. Rata-rata rasio belanja operasi dengan persentase sebesar 72% dan rata-rata rasio

belanja modal sebesar 27% dikategorikan tidak serasi.

3.5 Rasio Pertumbuhan

Perhitungan rasio pertumbuhan dapat dijelaskan pada tabel 9 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 9. Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan	Rasio	Kriteria/
	PADt-PADt-1 (a)	(b)	b/a x 100%	Penilaian
2016	75.797.426.519,36	-	-	-
2017	115.521.939.795,78	39.724.513.276,42	52%	Naik
2018	105.606.815.786,70	-9.915.124.009,08	-9%	Turun
2019	100.950.256.993,95	-4.656.558.792,75	-4%	Turun
2020	86.319.561.348,87	-14.630.695.645,08	-14%	Turun
Rata-rata			6%	Naik

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 9 Perhitungan rasio pertumbuhan pada tahun 2017 PAD mengalami pertumbuhan dengan nilai rasio 52%, pada tahun 2018 turun dengan rasio

-9%, pada tahun 2019 turun dengan nilai rasio -4% dan pada tahun 2020 turun dengan rasio -14%. Rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 6%.

Tabel 10. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan daerah

Tahun	Pendapatan Daerah	Pertumbuhan	Rasio	Kriteria/
	Pt-Pt-1 (a)	(b)	b/a x 100%	Penilaian
2016	883.629.694.929,98	-	-	-
2017	906.258.990.999,98	22.629.296.070,00	3%	Naik
2018	923.898.833.425,26	17.639.842.425,28	2%	Naik
2019	1.029.631.473.221,94	105.732.639.796,68	11%	Naik
2020	1.026.932.400.770,59	-2.699.072.451,35	- 0,26%	Turun
Rata-rata			4%	Naik

Sumber : Data terolah, 2022

Berdasarkan tabel 10 perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan 2020. pada tahun 2017sebesar 3%, pada tahun 2018 rasio pertumbuhan turun

menjadi 2%, pada tahun 2019 naik menjadi 11% dan pada tahun 2020 turun dengan rasio -0,26%. Rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 4%.

Tabel 11. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja daerah

Tahun	Belanja Daerah	Pertumbuhan	Rasio	Kriteria/
	Bt-Bt-1 (a)	(b)	b/a x 100%	Penilaian
2016	809.943.066.643,08	-	-	-
2017	870.709.076.209,71	60.766.009.566,63	8%	Naik
2018	859.504.888.223,19	-11.204.187.986,52	-1%	Turun
2019	943.561.222.062,40	84.056.333.839,21	10%	Naik
2020	1.020.120.939.565,77	76.559.717.503,37	8%	Naik
Rata-rata			6%	Naik

Sumber : Olahan Data, 2022

Berdasarkan tabel 11 tersebut rasio pertumbuhan belanja daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan 2020. pada tahun 2017sebesar 8%, pada tahun 2018 rasio pertumbuhan belanja

daerah turun menjadi -1%, pada tahun 2019 naik menjadi 10% dan pada tahun 2020 turun dengan rasio 8%. Rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 6%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa atau perhitungan rasio kemandirian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau sangat rendah dilihat dari perhitungan rasio kemandirian pada tahun 2016-2020 rasio kemandirian rata-rata mencapai 12% tergolong rendah sekali dan berpola instruktif. Menurut (Halim, 2007 dalam Qur'ani & Panggiarti, 2021) Pola hubungan “instruktif” adalah peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah. Hasil penelitian terdahulu (Hartoyo & Arsad, 2021) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya tergolong pola hubungan instruktif rasio ini 7,17% keterangan sangat rendah.

Rasio efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah 82%. Dikategorikan kurang efektif. Hasil Penelitian terdahulu (Kusumadewi, 2021) dengan judul penelitian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran 2015-2019. Dalam hasil penelitian bahwa kinerja keuangannya kurang optimal dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorika belum cukup efektif.

Rasio efisiensi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 951% dikategorikan Tidak Efisien, berdasarkan kriteria tingkat efisiensi kinerja keuangan yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2019, hlm. 142) semakin kecil rasio efisiensinya maka tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin baik maka

sebaliknya. Hasil Penelitian terdahulu (Setiawan, 2021) dengan judul penelitian “Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018: Imajiner atau Realita?” menunjukkan Rasio efisiensinya tergolong kurang efisien mengelola keuangan dengan nilai rasionya mendekati 100 persen.

Rasio aktivitas Rasio aktivitas 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat diketahui bahwa rata-rata rasio belanja operasi dengan persentase sebesar 72% dan rata-rata rasio belanja modal sebesar 27% dikategorikan Tidak Serasi. sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuklinggau dipergunakan untuk belanja operasi.

Rasio Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kota lubuklinggau dari tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 6% dikategorikan Naik atau mengalami pertumbuhan. Rasio pertumbuhan Pendapatan daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau mencapai 4% dikategorikan Naik atau mengalami pertumbuhan. Rasio pertumbuhan belanja daerah menunjukkan rata-rata rasio pertumbuhan mencapai 6% dikategorikan Naik. Hasil Penelitian terdahulu (Fornia dkk., 2021) dengan judul penelitian “Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010-2019” dalam penelitiannya bahwa menunjukkan Pemerintah Kota Jambi pada rasio pertumbuhan pendapatan, rata-rata tahun 2010 sampai tahun 2019 adalah 11,16 persen.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Rasio Kemandirian dari hasil perhitungan tergolong rendah sekali rata-rata rasionya adalah 12% pola hubungan instruktif yang mana peranan pemerintah pusat mendominasi. Untuk nilai Rasio Efektivitas tergolong kurang efektif berdasarkan penilaian menurut (Mahmudi,

2019), Rata-rata rasio efektivitas adalah 82%. Berdasarkan perhitungan Rasio efisiensi periode 2016-2020 nilai rasionya dapat dikatakan tidak efisien menurut standar penilaian yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2019), Rata-rata rasio efisiensi adalah 951%. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat minim dibandingkan dengan biaya pengeluaran daerah keseluruhan yang sangat besar. Nilai Rasio Aktivitas dikategorikan tidak serasi hal ini didasari oleh standar penilaian oleh (Mahmudi, 2019), rasio aktivitas dengan rata-rata belanja operasi adalah 72%, sedangkan rata-rata belanja modal adalah 27%.

Selanjutnya Rasio Pertumbuhan periode 2016-2020 dapat dikatakan baik karena menunjukkan nilai rasio yang positif. Rasio pertumbuhan PAD sebesar 6%, Rasio pertumbuhan pendapatan daerah pemerintah kota lubuklinggau sebesar 4%, dan Rasio pertumbuhan belanja daerah menunjukkan rata-rata rasio pertumbuhan mencapai 6%.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Fornia, E., Mukhzarudfa, M., & Gowon, M. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 – 2019. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(1), 34–44. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i1.13301>
- Hartoyo, H., & Arsad, A. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DOMPU). *JURNAL PENDIDIKAN DAN EKONOMI (PENKOMI)*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.33627/pk.v4i1.437>
- Kusumadewi, V. P. (2021). KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015-2019. 6, 17–29.
- Mahmudi. (2019). *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4 ed.). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Peraturan Walikota Lubuklinggau. (2019). *Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau*.
- Qur'ani, S., & Panggiarti, E. K. (2021). THE ANALYSIS OF TERRITORY FINANCIAL RATIO AS PERFORMANCE VALUE IN THE GOVERNMENT OF MAGELANG CITY. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 11.
- Setiawan, T. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016-2018 :IMAJINER ATAU REALITA ? 1, 12.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.